PERAN POLITIK UMAT ISLAM PASCA KEMERDEKAAN INDONESIA (Studi Kasus Partai Masyumi 1945)

Oleh:
Zuhrotul Latifah, S.Ag., M.Hum

A. Pendahuluan

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, tiga hari kemudian bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan bukan berarti perjuangan bangsa telah usai, karena Indonesia kemudian dihadapkan pada kenyataan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan inilah salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendirikan partai politik. Salah satu partai itu adalah Masyumi.

Sejarah kepartaian di Indonesia diawali pada tanggal 30 Oktober 1945, ketika Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang berfungsi sebagai parlemen sementara sebelum diadakannya pemilu, mengeluarkan keputusan untuk membentuk suatu sistem kepartaian atas dasar konsep multi partai. Pertimbangan dari keputusan ini adalah agar berbagai pendapat di masyarakat dapat disalurkan dengan tertib. Sebagai pertimbangan lain, bahwa partai politik diharapkan akan memperkokoh perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa. Atas dasar keputusan itu, maka keluarlah Maklumat Pemerintah nomor X tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk mendirikan partai politik, maka dibentuklah beberapa partai politik, dan partai Masyumi adalah salah satu partai yang dibentuk melalui muktamar umat Islam pada tanggal 7 sampai 8 November 1945 di Yogyakarta.

Kegagalan Umat Islam dalam menjadikan Islam sebagai dasar negara pada sidang BPUPKI dan menerapkan Piagam Jakarta telah mendorong semangat mereka untuk bersatu padu membentuk satu wadah politik untuk terlaksananya ajaran Islam dalam kehidupan seseorang, masyarakat, dan negara Republik Indonesia menuju keridlaan Ilahi. Perjalanan partai Masyumi penuh dengan dinamika, baik di dalam tubuh partai itu sendiri maupun dalam hubungannya dengan partai politik lain dan dengan pemerintah. Sebelum dibentuknya partai Masyumi, kesatuan gerak politik umat Islam Indonesia tersebar di berbagai organisasi dan partai-partai Islam yang dirasakan tidak memadai sebagai wahana perjuangan. Oleh karena itu dipandang sudah sangat mendesak agar umat merapatkan barisan dalam satu partai politik, maka berdirilah Partai Masyumi sebagai hasil kongres umat Islam di Yogyakarta tanggal 7-8 November 1945.

Keanggotaan Partai Masyumi ada dua kategori yaitu anggota perorangan dan anggota organisasi atau disebut anggota istimewa. Dualisme keanggotaan ini sangat berpengaruh terhadap pesatnya perkembangan partai karena dengan anggota perorangan partai ini berhasil menghimpun tokoh-tokoh intelektual yang tangguh dalam membesarkan partai. Dengan keanggotaan organisasi, Partai Masyumi berhasil merangkul hampir semua organisasi Islam di seluruh Indonesia kecuali Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), sehingga mempercepat besarnya partai. Akan tetapi, dualisme keanggotaan ini juga menjadi kelemahan partai karena organisasi-organisasi yang ada di dalam partai ini tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan kegiatan sosial keagamaannya, sehingga mereka sering lebih mendahulukan kepentingan golongan atau kepentingan individu daripada kepentingan partai.

Tulisan ini dipandang penting karena dalam sejarahnya Masyumi mempunyai andil besar dalam perpolitikan di Indonesia, pada masa revolusi Masyumi turut serta dalam melawan kedatangan Belanda kembali untuk menjajah melalui perlawanan fisik maupun dengan jalur diplomasi. Di pemerintahan, mereka juga banyak

mempunyai peran dalam parlemen dan konstituante terutama pada masa Demokrasi Parlementer. Ada kalanya partai ini berkoalisi dengan partai lain dalam pembentukan kabinet, tetapi pernah juga menjadi partai oposisi. Bagi Masyumi, keterlibatan dalam pemerintahan merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu kajian ini membahas tentang proses berdirinya, maksud dan tujuannya, dan pengaruh dualisme keanggotaan partai terhadap eksistensi Partai Masyumi.

Tulisan ini adalah kajian sejarah. Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah metode sejarah, semaksimal mungkin diupayakan untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar metode penelitian sejarah sejak dari pengumpulan data, verifikasi, interpretasi dan penulisannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Robert Berkhofer, Jr. dalam bukunya *A Behavioral Approach to Historical Analysis* mengenai behavioralism, yaitu suatu pendekatan modern sejarawan kontemporer terhadap perilaku manusia. Sebagai langkah awal untuk menganalisis suatu peristiwa sejarah adalah memahami perilaku manusia dengan pendekatan situasional karena perilaku manusia terjadi dalam situasi-situasi sehingga memerlukan interpretasi oleh para pelaku. Dengan demikian tugas sejarawan di sini adalah mengkaji situasi pelaku, interpretasi pelaku terhadap situasi dan aksi yang diambil pelaku atas situasi yang ada.

Interpretasi situasional yang dikembangkan oleh Berkhofer ini sesuai dengan teori Karel Popper "logika situasional" yaitu suatu usaha untuk menggambarkan situasi seperti dahadapi oleh individu dan usaha untuk merekonstruksi faktor-faktor itu dalam situasi yang mencakup kepercayaan-kepercayaan dan kecenderungan-kecenderungannya. Masih menurut Berkhofer, pendekatan ini juga selaras dengan pendekatan yang dikembangkan oleh R.G. Collingwood tentang konsepsi sejarah sebagai penampakan ulang pengalaman masa lalu sehingga sejarawan harus mengetahui apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi. Dalam hal ini, banyak sejarawan yang

melangkah lebih dari sekedar pengidentifikasian karena mereka harus simpati terhadap subjek biografi dan bahkan menjadi bagian dari latar masyarakat, ekonomi, dan ras yang sama agar dapat memahami orang-orang masa lalu.

Tugas analisis sejarah yang ke dua adalah mengemukakan pandangan peneliti terhadap pelaku dan aksinya terhadap situasi yang ada. Dengan demikian keberhasilan analisis ini tergantung pada kemampuan sejarawan dalam membedakan situasi riil dari interpretasi pelaku terhadap situasi dan tujuan pelaku dari aksi-aksinya dalam situasi itu. Selanjutnya sejarawan harus mengkombinasikan sudut pandang pelaku dengan sudut pandang peneliti agar dapat menghasilkan analisis yang dapat memperkirakan realitas sejarah. Secara ringkasnya prosedur analisis sejarah dengan pendekatan situasional menurut Berkhofer adalah sebagai berikut.

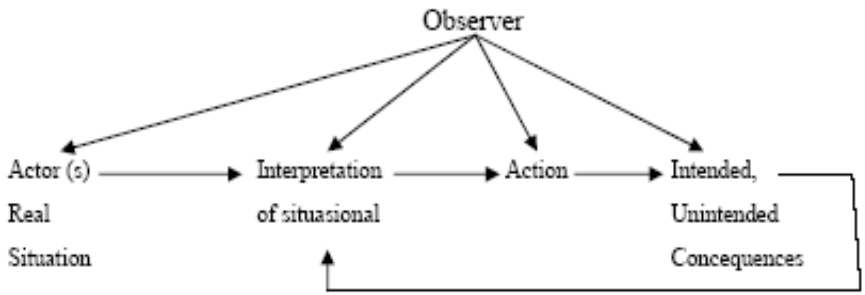

1. Menentukan interpretasi pelaku terhadap situasi.
2. Menentukan perilaku pelaku dalam situasi itu.
3. Mendeteksi umpan balik terhadap pelaku.
4. Mendefinisikan situasi nyata dari pelaku seperti yang dilihat peneliti.[1]

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang perjuangan umat Islam Indonesia pasca kemerdekaan1945, melalui Partai Masyumi

[1] Berkhofer, Jr. *A Behavioral Approach to Historical Analysis* (New York: Collier Macwllan Limitid London The Free Press, 1971), hlm. 46-70.

1945 umat Islam memainkan peranan yang sangat penting. Partai Masyumi merupakan pengejawantahan dari aspirasi umat Islam yang menginginkan adanya keterkaitan antara kehidupan beragama dengan kehidupan bernegara. Partai ini memang mempunyai muatan dan tujuan untuk menampung aspirasi politik umat Islam untuk memberikan corak baru bagi bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Dalam perjuangannya, partai ini mengkhususkan diri pada bidang politik dalam rangka menegakkan ajaran Islam dalam wadah Indonesia merdeka. Indonesia telah mencatat sejarah kebesaran partai Masyumi sebagai partai Islam terbesar yang pernah ada. Pada saat itu aliran politik di Indonesia secara kasar dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: Islam, Marxisme/Komunisme dan nasionalisme.[2]

Umat Islam memang sangat berharap pada Partai Masyumi. Partai baru ini dalam waktu yang relatif singkat telah muncul sebagai partai yang sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia. Para ulama dan para pemimpin politik Islam segera bergabung dengan partai ini. Selama empat tahun lebih, Masyumi bersama dengan golongan lain berjuang mempertahankan kemerdekaan yang dirongrong Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Di bawah pimpinan Masyumi, umat Islam tetap komitmen untuk mempertahankan kemerdekaan sebagai jihad fi sabilillah. Pada saat itu, Indonesia juga diperlemah oleh politik golongan kiri seperti PKI, Partai Sosialis, Pesindo dan Partai Buruh dalam menghadapi Belanda yakni adanya penandatanganan perjanjian Linggarjati (1946) dan Renvill (1947). Dalam kondisi kritis itu, Masyumi tetap konsisten memihak kepada Republik.

B. Pembentukan Partai Masyumi 1945

Muktamar umat Islam tanggal 7 dan 8 November 1945 merupakan tonggak awal perjuangan partai Islam di Indonesia. Konggres yang diselenggarakan di gedung Madratsah Mu'allimin, Yogyakarta ini

[2] Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press,1988), hlm. 30.

dihadiri oleh sekitar 500 utusan organisasi sosial keagamaan yang mewakili hampir semua organisasi Islam yang ada. Gagasan untuk menjadikan Masyumi sebagai organisasi sosial-politik dimunculkan oleh sekelompok pemimpin Islam di Jakarta yaitu: K.H. Abdul Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, dan Muhammad Roem.[3] Keputusan untuk mendirikan partai Masyumi bukan hanya keinginan dari beberapa tokoh saja, bahkan mendapat dukungan dari para ulama kelompok tradisional maupun modernis. Pada awalnya dukungan datang dari Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, kemudian disusul oleh Perikatan Umat Islam, Persatuan Umat Islam, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), Persis (Persatuan Islam) pada tahun 1949, Jam'iyyatul Washliyah dan Ittihadiyah serta PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pada tahun 1949, Al Irsyad pada tahun 1950, selanjutnya Mathlaul Anwar di Banten dan Nahdhatul Wathan di Lombok juga ikut bergabung.[4] Bergabungnya organisasi-organisasi ini memberikan andil besar terhadap penambahan anggota Masyumi dan memperluas pengaruh Masyumi itu sendiri ke berbagai wilayah Indonesia.[5]

"Kegagalan" umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara serta tidak digunakannya Piagam Jakarta mendorong mereka untuk bersatu. Mereka merasa perlu membentuk satu wadah yang dapat menjadi payung bagi seluruh kekuatan Islam pada saat itu, sehingga gagasan membentuk partai ini mendapat tempat di kalangan umat Islam.[6]

---

[3] Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 626.

[4] Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: Pustaka Utama Grafitti, 1988), hlm. 50.

[5] Einar Martahan Sitompul*, NU dan Pancasial (*Yogyakarta:Lkis, 2010), hlm. 94.

[6] Abdul Azis, *Politik Islam Islam Politik: Pergulatan Ideologi PPP Menjadi Partai Islam* (Yogyakarta:Tiara Wacana,2006), hlm. 36.

Penggunaan nama Masyumi bukan berarti bahwa partai ini kelanjutan dari organisasi bentukan Jepang (Masyumi 1943 yang merupakan kelanjutan dari MIAI). Ia benar-benar lahir dari kesadaran politik umat Islam atas dasar persamaan persepsi dan keyakinan serta kesatuan faham (ideologi) yang berdasarkan Islam.[7] Nama Masyumi tetap dipertahankan karena sudah dikenal luas sehingga mudah diingat, yang semula akan memakai nama Partai Rakyat Islam.[8] Pada awalnya partai ini dipandang sebelah mata karena dianggap menyamai Masyumi "bentukan" Jepang. Ada perbedaan mendasar antara partai ini dengan yang dibentuk Jepang yaitu, Masyumi 1943 merupakan badan umat Islam yang dibentuk agar umat Islam membantu Jepang dalam berbagai urusan terutama untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Dengan kata lain Masyumi di sini dijadikan alat untuk pemenuhan kebutuhan Jepang sendiri, sedangkan Partai Masyumi 1945 merupakan wadah perpolitikan umat Islam Indonesia lepas dari dominasi siapapun.

Pembentukan partai Masyumi adalah dalam rangka menyalurkan aspirasi politik umat sebagai cerminan dari potensi besar yang kongkrit. Suatu massa kongkrit tanpa pimpinan partai politik yang berasas Islam akan mudah jatuh ke tangan kelompok yamg menolak penerapan syari'at dalam kehidupan bernegara d paska kemerdekaan Indonesia.[9]

Dalam muktamar November 1945, partai ini memutuskan beberapa hal yaitu:

1. Masyumi merupakan partai politik Islam.
2. Masyumi merupakan satu-satunya partai politik di kalangan umat Islam.

---

[7] Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia* (Yogyakarta: PT Pustaka Parama Abiwara,1992), hlm. 69.

[8] Deliar Noer, *Partai Islam,* hlm. 46-47.

[9] Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES: 1985), hlm. 111.

3. Memperkuat persiapan umat Islam untuk *berjihad fi sabilillah* dalam melawan segala bentuk penjajahan.
4. Memperkuat pertahanan Negara Indonesia dengan menyusun barisan Sabilillah di daerah-daerah.
5. Memilih Dr.Soekiman sebagai ketua dan wakil ketua masing-masing Abikusno dan Wali al-Fatah.

Ketiga orang itu diberi mandat untuk menyusun kepengurusan Masyumi.[10] Secara ideologi, partai ini merupakan kelanjutan dari Majlis Islam A'la Indonesia (MIAI) tetapi perjuangannya hanya khusus dalam bidang politik dalam rangka menegakkan ajaran Islam dalam wadah Indonesia merdeka. Menurut Syafi'i Ma'arif ada dua alasan mengapa K.H. Mas Manshur (Muhammadiyah), K.H. Muhammad Dahlan (NU), dan K.H.Wahab Hasbullah (NU) pada tanggal 21 September 1937 mendirikan MIAI. Alasan pertama adalah usaha-usaha politik Islam waktu itu dinilai belum mantap seperti yang diharapkan, padahal persatuan umat Islam sangat diperlukan untuk menghadapi kolonial. Alasan kedua adalah merujuk pada landasan spiritual tentang anjuran pentingnya persatuan Islam dan tidak bercerai-berai sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran:103. Pendapat ini mendapat dukungan dari Prawoto Mangku Sasmito bahwa tujuan dibentuknya MIAI adalah untuk mempersatukan gerakan politik umat Islam untuk melawan kolonialisme Belanda.[11] Hampir semua partai Islam lokal maupun nasional kecuali Perti[12] mendukung kehadiran Masyumi sebagai satu-

[10] Insan Fahmi Siregar,"Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi,1945-1960" dalam *Thaqafiyyat* Volume 12, No. 1 Januari-Juni 2011.

[11] Amir Hamzah Wirjosukarto (ed.), *Wawasan Politik Seorang Patriot: Soekiman Wirjosendjojo1898-1974* (Malang:YP2LPM,1984), hlm. 62.

[12] Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) awalnya merupakan organisasi tradisional Islam yang berpusat di Bukit Tinggi, Sumatra Tengah tepatnya di pesantren di Candung, Bukit Tinggi pada tanggal 20 Mei 1930. Pendirinya adalah Syeh Abas dari Padng Lawas, Syeh Sulaiman al-Rasuli dari Candung dan Syaikh Muhammad Djamil Djaho dari Padang Japang. Dalam hal pendidikan tokoh-tokoh

satunya partai Islam di Indonesia ketika itu. Dalam perjalanannya, Partai Masyumi dianggap sebagai partai Islam terbesar di Indonesia dan tampil sebagai pembela demokrasi yang tangguh dalam negara Republik Indonesia.

Konggres November 1945 juga memutuskan bahwa sebagai ketua panitia adalah Moehammad Natsir dengan anggota-anggota Soekiman Wirjosendjojo, Abikuso Tjokrosujoso, A.Wahid Hasyim, Wali al-Fatah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Paku Alam VIII dan A Gaffar Ismail. Adapun pengurus Masyumi periode awal ini terdiri atas Majlis Syuro dan pimpinan Partai. Majlis Syuro merupakan lembaga penasehat yang bertugas untuk memberi nasehat dan fatwa kepada pimpinan partai dalam pekerjaan partai secara garis besar. Kepemimpinan Majlis Syuro didominasi oleh para ulama terutama pemimpin organisasi keislaman. Pada periode awal, majlis ini diketuai K.H. Hasyim Asy'ari (NU) dibantu Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah), K.H.Wahid Hasyim (NU), dan Mr.Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah). Anggota Majlis Syura terdiri atas RHM Adnan (Persatuan Penghulu dan Pegawainya), H Agus Salim (Penyadar), K.H. Abdul Wahab Hasbullah (NU), K.H. Sanusi (PUI), K.H. Abdul Halim (PUI), dan Syeh Djamil Djambek (Majlis Islam Tinggi).[13]

Adapun Pimpinan Partai merupakan lembaga eksekutif yang membuat pernyataan politik dan memutuskan kebijakan partai. Kepengurusan pimpinan partai ini didominasi oleh politisi karir yang berlatar belakang pendidikan Barat. Badan eksekutif ini diketuai oleh

---

ini sudah menerapkan model persekolahan dengan berpegangteguh pada madzhab Syafi'i dan merujuk pada kitab-kitab madzhab itu. Organisasi ini berkembang sampai ke Jabi, Tapanuli, Bengkulu, aceh, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Tahun 1944 Perti bergabung dengan Majlis Islam Tinggi (MIT) pimpinan Syaikh Muhammad Djamil Djambek yang kemudian menjadi partai politik sehubungan dengan maklumat pemerintah 1945. Lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional,* hlm. 77-81.

[13] Samsuri*, Politik Islam Anti Komunis, Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hlm.11.

Soekiman Wirjosendjojo (PII), Abikusno Tjokrosujoso (PSII) sebagai ketua muda 1 dan Wali al Fatah (PII) sebagai ketua muda II. Sebagai sekretaris I adalah Harsono Tjokroaminoto (PSII), sekretaris II Prawoto Mangkusasmito (Muhammadiyah) dan Mr. Kasmat Singodimejdo sebagai bendahara.

Selain Majlis Syura dan Pengurus Besar (Badan Eksekutif), masih ada pengurus-pengurus yang lain yang diputuskan dalam kongres November 1945 yaitu pimpinan bagian penerangan, bagian barisan Sabilillah dan Hizbullah, bagian keuangan dan anggota. Bagian penerangan dipimpin oleh Wali al Fatah, bagian barisan dipimpin K.H.Masykur (NU), Wondoamiseno (PSII), H.Hasyim (Muhamnmadiyah) dan Susilo Hadikusumo (Jong Islamieten Bond/JIB). Bagian keuangan terdiri atas Mr. Kasmat, R.Prawiro Juwono (Muhammadiyah), H.Hamid BKN (Muhammadiyah), dan Harsono Tjokroaminoto (PSII).

Anggota dari kepengurusan eksekutif terdiri dari K.H. Muhammad Dahlan (NU), H. M. Farid Ma'ruf (Muhammadiyah), Junus Anis (Muhammadiyah), K.H.Fathurrahman (NU), Abu Hanifah, Muhammad Natsir (Persis), SM Karto Suwiryo (PSII Baru), Anwar Tjokroaminoto (Muhammadiyah), Syamsuddin (Muhammadiyah) dan Mr. Muhammad Roem (Penyadar).[14]

Keterwakilan tokoh-tokoh berbagai organisasi Islam ke dalam Masyumi mencerminkan sifat pluralisme sebagai partai tunggal Islam yang bisa menghimpun semua potensi kekuatan politik Islam. Menurut Yusril, motif itu muncul karena didorong pandangan dasar modernisme yang positif dan optimis dalam memandang pluralisme sehingga memantapkan mereka untuk bersatu dalam satu partai yaitu Masyumi.[15] Dengan demikian Masyumi adalah gabungan semua golongan Islam yang didorong oleh semangat persatuan agar umat

---

[14] Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik,* hlm. 31.

[15] Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at Islami (Pakistan*) (Jakarta:Paramadina: 1999), hlm. 62-63.

Islam mempunyai kekuatan yang utuh dan padu untuk memperjuangkan aspirasi Islam.

C. Maksud dan Tujuan Didirikannya Partai Masyumi

Pembentukan partai ini adalah upaya untuk menyalurkan aspirasi politik bagi uamt Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bagi penduduk Indonesia sebagai penjelmaan kehendak, cita-cita dan potensi mereka dalam pandangan politik kenegaraan. Sebagai maksud lain dari berdirinya partai ini adalah untuk mengakomodasi massa Islam yang besar agar tidak jatuh ke golongan yang menentang penerapan Syari'at Islam dalam kehidupan bernegara.

Sesuai keputusan konggres umat Islam pertama pada tanggal 7 dan 8 November1945 pasal II, (1) Masyumi bertujuan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan Agama Islam, (2) Melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan ketatanegaraan.[16] Tujuan ini dipertegas dalam pasal III yaitu:

a. Menginsafkan dan memperluas pengetahuan serta kecakapan umat Islam Indonesia dalam perjuangan politik.
b. Menyusun dan memperkokoh barisan umat Islam untuk berjuang mempertahankan agama dan kedaulatan negara.
c. Melaksanakan kehidupan sosial rakyat berdasarkan iman dan taqwa, perikemanusiaan sosial, persaudaraan dan persamaan hak menurut ajaran Islam.
d. Bekerja bersama-sama dengan lain golongan dalam lapangan perjuangan menegakkan kedaulatan negara.[17]

Tujuan Masyumi ini didasari oleh pemikiran bahwa di dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan agama dengan urusan politik (negara). Dengan demikian menegakkan Islam tidak dapat

[16] Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis,* hlm. 17.

[17] *Ibid.*

dipisahkan dari menegakkan masyarakat, menegakkan negara, dan menegakkan kemerdekaan.[18] Pemisahan antara agama dengan politik mungkin tepat bagi agama-agama di luar Islam, terutama agama Kristen (Katholik).

Pencapaian tujuan dari Masyumi ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam program kerja dalam negeri sebagai berikut:

1. Meperkuat persiapan umat Islam untuk *berjihad fi sabilillah*.
2. Memperkuat barisan pertahanan negara Indonesia dengan berbagai usaha yang diwajibkan agama Islam.
3. Menyesuaikan dan sifat Masyumi sebagai pusat persatuan umat Islam Indonesia sehingga dapat menggerakkan dan memimpin perjuangan umat Islam seluruhnya.
4. Menghormati dan menghargai jasa para pahlawan terutama angkatan muda terutama yang meninggal maupun tidak dalam perjuangan menegakkan kedaulatan negara.
5. Memohonkan kepada pemerintah Republik Indonesaia supaya mendesak kaum sekutu menyegerakan pelucutan senjata dan pengembaliannya agar bala tentara sekutu dapat segera pulang ke negaranya.

Adapun program kerja luar negeri adalah menyampaikan putusan ini kepada dunia pada umumnya dan dunia Islam pada khususnya.[19] Selain itu, Masyumi juga menekankan programnya pada bidang ekonomi dan sosial. Dalam bidang sosial, Masyumi menuntut:[20]

1. Adanya Undang-undang guna kesejahteraan umum yang mencakup larangan segala macam perjudian, minuman keras dan madat, perzinaan dan riba.

---

[18] Muhammad Natsir, *Islam sebagai Ideologi Masyumi* (Jakarta: Aida,1950), hlm. 7.

[19] Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis*, hlm. 13.

[20] Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hlm. 119.

2. Undang-undang ynag memberi perlindungan kepada kaum buruh secukupnya dengan kesempatan cukup untuk melakukan syari'at Islam dalam waktu kerja, upah minimum, pembatasan jam kerja, bantuan kecelakaan dan bantuan hari tua, penjagaan keamanan dalam bekerja, kesehatan dan perumahan, serta mempertinggi kecerdasan, dan kesempatan untuk istirahat.
3. Undang-undang yang memberi jaminan kepada kaum tani dalam hak memiliki sebidang tanah untuk jaminan hidup berumah tangga, perbaikan alat dan bibit pertanian, perlindungan penjualan hasil bumi di dalam dan di luar negeri, peningkatan derajat dan modernisasi rumah tangga desa serta peningkatan kecerdasan kaum tani khususnya mengenai pertanian.
4. Hal yang sama dilakukan untuk keperluan para nelayan.
5. Partai ini juga menuntut tertib untuk terlaksananya undang-undang kewajiban belajar.

Dalam bidang ekonomi Partai Masyumi berpendapat:[21]

1. Negara wajib mengadakan kemungkinan berusaha dan memberikan lapangan kerja bagi warga negaranya.
2. Perekonomian rakyat perlu disusun atas dasar gotong royong, yang di dalam nya usaha perorangan tidak boleh merupakan kepentingan umum dan diarahkan untuk menjamin kemakmuran bersama.
3. Pembatasan hak milik perorangan dengan ketentuan agama Islam (pemberian zakat, kurban dan lain sebagainya).
4. Sistem kapitalisme yang nyata mengadung kepentingan perorangan belaka harus ditentang.

[21] *Ibid*., hlm. 120.

Dalam anggaran dasarnya sebenarnya Masyumi juga telah menegaskan tujuan jangka panjangnya yaitu untuk terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan orang-seorang, masyarakat dan negara Republik Indonesia menuju keridhaan Ilahi.[22] Dari rumusan tujuan ini dapat ditangkap bahwa Masyumi ingin membangun Indonesia yang bercorak Islam dengan memberikan kebebasan kepada golongan-golongan lain untuk berbuat dan memperjuangkan aspirasi politiknya sesuai dengan agama dan ideologi masing-masing. Sejarah kemudian membuktikan akan kejujuran Masyumi dalam mempertahankan prinsip-prinsip demokrasinya dalam keberagaman sosial dan budaya di Indonesia sehingga walaupun secara politik Masyumi ini sudah berakhir tetapi pemikiran-pemikirannya masih diikuti oleh umat Islam masa kini.

Menurut tokoh-tokoh Masyumi hal yang paling mendesak untuk dilakukan ketika itu adalah menyikapi suasana "revolusi Indonesia" dan adanya persaingan berbagai ideologi politik dalam masyarakat Indonesia.[23] Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 bukan berarti Indonesia sudah aman dan sejahtera, karena itu Masyumi bersama-sama golongan lain memusatkan perhatian pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang masih dirongrong oleh Belanda yang ingin meneruskan penjajahannya kembali. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini baru berakhir setelah perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar) ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan kerajaan Belanda di Den Haag pada bulan Desember 1949.[24] Di lain pihak, adanya maklumat pemerintah yang ditandatangani wakil presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai di Indonesia kemudian lahirlah banyak partai politik yang mewakili berbagai aliran ideologi-politik yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat.

---

[22] Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik,* hlm. 32.

[23] Muhammad Natsir, *Islam sebagai Ideologi Masyumi*, hlm. 66

[24] Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik*, hlm. 33

Suasana revolusi yang sedang bergolak di Indonesia pada awal kemerdekaan dan persaingan dengan berbagai kelompok ideologi seperti nasionalisme dan marxisme/sosialisme mendorong tokoh-tokoh Masyumi untuk bersatu padu menghimpun potensi kekuatan politik umat Islam. Partai Masyumi ini memiliki sifat pluralisme, ini dibuktikan dengan banyaknya aliran pemikiran keagamaan pada anggota-anggotanya. Dualisme keanggotaan yaitu anggota organisasi/federatif dan anggota perorangan memperkuat fenomena pluralisme Masyumi karena masing-masing anggota masih diberikan kebebasan untuk menjalankan kegiatan sosial keagamaannya. Sifat pluralisme ini telah mendorong Masyumi bersikap terbuka yakni bersedia untuk bekerjasama dengan golongan lain dalam mencapai tujuannya.

D. Pengaruh Dualisme Keanggotaan bagi Eksistensi Partai Masyumi

Dalam tempo yang relatif cepat, partai baru ini menjadi partai yang mengakar kuat di kalangan umat Islam. Hal ini terjadi karena ulama dan para pemimpin politik Islam dari seluruh Tanah Air segera bergabung dengan partai ini, sekalipun banyak di antara mereka tidak bisa hadir dalam konggres karena sulitnya transportasi.[25] Masyumi memiliki dua bentuk keanggotaan yaitu anggota perseorangan dan anggota organisasi. Persyaratan untuk menjadi anggota perseorangan minimal berusia 18 tahun atau sudah menikah dan tidak dibenarkan menjadi anggota partai lain. Anggota perseorangan ini mempunyai hak suara, sedangkan anggota organisasi (disebut anggota istimewa) mempunyai hak untuk memberikan nasehat atau saran.[26]

---

[25] Letak yang saling berjauhan dan dipisahkan oleh pulau menjadikan mereka tidak dapat menghadiri konggres, tetapi mereka tetap mendukung dan menyetujui adanya Partai Masyumi sebagai partai politik yang menaungi organisasi Islam yang berada di berbagai wilayah Indonesia. *Ibid.*

[26] Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hlm. 52

Tersebarnya Masyumi ke berbagai penjuru tanah air adalah berkat sokongan dari anggota istimewa/federatif partai. Di samping itu Masyumi juga mendapat dukungan dari anak-anak organisasi yang didirikannya antara lain: Sarekat Tani Islam Indonesia yang didirikan tanggal 26 Oktober 1946 di Yogyakarta, Serikat Buruh Islam Indonesia yang didirikan tanggal 27 November 19947 di Solo, Serikat Nelayan Islam Indonesia yang didirikan tahun 1950-an,[27] Muslimat untuk wanita dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Mereka ini disebut sebagai keluarga Bulan Bintang karena berpangkal pada lambang partai.

Ide dualisme keanggotaan didasari pertimbangan untuk memperbanyak anggota, sebagai sebab lainnya adalah agar Masyumi dapat dilihat sebagai wakil umat tanpa ada yang merasa terwakili. Alasan-alasan ini bisa diterima tetapi belum bisa menyelesaikan persoalan mengenai apakah cara ini bisa meningkatkan kualitas dan kesadaran berpartai. Hal ini bisa dicontohkan seorang anggota NU suatu saat bisa mengakui sebagai anggota partai Masyumi hanya karena NU menjadi anggota Masyumi, tetapi tetap disangsikan apakah ia mengetahui dasar dan cita-cita Masyumi. Sangat mungkin orang tersebut tidak menyadari dan tidak mengetahui persoalan ini, padahal ini sangat penting bagi kekuatan partai karena kekuatan partai sebagian bergantung pada kesadaran anggotanya. Sampai keluarnya NU 1952, NU menjadi pendukung Masyumi yang juga memunculkan pertanyaan baru : hanya organisasinya yang terikat dengan Masyumi sehingga anggota NU tidak secara otomatis menjadi pendukung Masyumi. Lebih-lebih kalau dihubungkan dengan keanggotaan aktif, maka tidak secara otomatis anggota NU menjadi anggota Partai Masyumi.

Pada masa awal kemerdekaan, keterikatan seseorang terhadap suatu partai sangat tergantung pada kedudukan partai tersebut di tengah pergolakan politik di Tanah Air. Kalau kedudukannya kuat

[27] Insan Fahmi Siregar, "Sejarah Pertumbuhan, hlm.71

maka akan menjadi daya tarik untuk menghimpun umat. Cita-cita, ukhuwah dan loyalitas sangat bergantung pada imbalan berbentuk materi atau non materi.[28] Kondisi seperti ini rupanya masih terjadi pada masa sekarang ini.

Suatu organisasi Islam bisa masuk menjadi anggota Partai Masyumi bila mendapat persetujuan dari setengah anggota istimewa yang sudah ada. Ketika itu hampir tidak ada kesulitan untuk menjadi anggota Masyumi karena hampir semua pihak merasa perlu untuk bergabung dan memperkuat barisan Islam. Walaupun demikian, ada pengecualian yang diberikan kepada Jama'ah Ahmadiyah Lahore yang tinggal di luar Masyumi karena dianggap tidak termasuk golongan *Ahlu Sunnah wal Jama'ah.*[29]

Sampai tahun 1950-an masalah keangotaan Masyumi sering dibicarakan dalam konggres baik oleh Masyumi sendiri maupun oleh anggota istimewa. Persoalan-persoalan yang sering muncul adalah terkait dengan bagaimana sebaiknya hubungan antara anggota istimewa dengan Masyumi? Bagaimana hubungan antara sesama anggota istimewa dalam hal yang menyangkut persoalan politik, sekedar diam dan menerima keputusan Masyumi? Dalam anggaran rumah tangga sudah dijelaskan bahwa anggota istimewa berhak mengajukan tuntutan kepada pimpinan partai terkait dengan bidang gerak mereka, sebaliknya mereka juga dapat dimintai pendapat oleh pimpinan partai.[30] Pada dasarnya mereka kurang puas dengan ketentuan ini karena mereka ingin lebih didengar sebagai perimbangan dengan anggota perseorangan.

Persoalan keanggotaan ini ada tiga pendapat yang berkembang yaitu: pertama, setuju adanya anggota perseorangan dan anggota istimewa, tetapi di kalangan ini tidak menyetujui adanya anggota inti yang disaring dari anggota perseorangan. Pada anggota

---

[28] Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional,* hlm.52-53.

[29] Aliran Qadian sudah ditolak secara tegas untuk menjadi anggota Masyumi, *Ibid.*, hlm. 53.

[30] *Ibid.,* hlm.55

inti ini diharapkan lebih banyak berkorban untuk partai materi maupun tenaga dan lebih sadar akan tujuan, cita-cita dan cara bekerja partai. Pendapat ke dua, menginginkan partai berbentuk federasi dan keanggotaan perseorangan ditiadakan. Pendapat ke tiga, mendukung keanggotaan perseorangan dan istimewa dengan menegakkan keanggotaan inti. Pendapat ke tiga ini banyak mendapat persetujuan di kalangan anggota Masyumi tetapi persoalan hubungan antar anggota istimewa memang belum terpecahkan secara keseluruhan. Segenap kongres partai yang diadakan menyetujui sistem anggota inti, bahkan pada tahun 1945 sudah diputuskan adanya keanggotaan inti yang dianggap menjadi motor penggerak bagi partai. Pada tahun 1950 sudah dirumuskan perincian syarat anggota inti yaitu: agar mereka lebih mengetahui dan menyadari dasar, cita-cita, dan kebijaksanaan partai, aktif dalam menyebarluaskan ide partai, dan membayar lebih banyak kepada partai.[31]

Dualisme keanggotaan dalam tubuh Masyumi ini menyebabkan pesatnya perkembangan Masyumi karena Masyumi merupakan milik umat sehingga jangan sampai ada umat yang merasa tidak terwakili kepentingan politiknya, tetapi sekaligus menjadi kelemahan partai ini. Dengan secara perorangan bisa masuk menjadi anggota, maka partai ini berhasil menghimpun tokoh-tokoh intelek tangguh yang bisa membesarkan partai. Adapun dengan anggota organisasi /federatif partai ini berhasil menghimpun semua organisasi Islam yang tetap diberikan kebebasan dalam kegiatan sosial keagamaannya. Inilah yang juga menjadi kelemahan Masyumi karena semangat golongan sering lebih dominan daripada semangat persatuan, banyak juga yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Kegagalan dalam mengarahkan dan menyalurkan semangat golongan yang heterogen ini kemudian membawa partai ini berhadapan dengan masalah-masalah intern yang serius dalam tubuhnya. Posisi-posisi politik formal juga sering

[31] *Ibid.,* hlm.56

menjadi alasan para pemimpin politik dari berbagai sub-golongan umat ini untuk meninggalkan partai.[32] PSII pada tahun 1947 meninggalkan Masyumi dan kemudian menjadi partai tersendiri adalah contoh kongkrit dari fenomena ini. Pada tahun 1952 NU yang merupakan organisasi yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Masyumi juga mengikuti jejak PSII untuk menjadi partai tersendiri.

Berkaitan dengan dualisme keanggotaan ini, NU menghendaki agar dualisme itu dihapuskan dengan jalan mengubah organisasi Masyumi menjadi badan federasi dari partai-partai politik dan organisasi Islam yang lain atau menetapkan Masyumi sebagai suatu partai yang beranggotakan perorangan saja kemudian dibentuk federasi baru yang namanya bukan Masyumi. Selain itu, NU juga menghendaki agar diadakan ketentuan mengenai perimbangan suara masing-masing anggota federasi menurut perimbangan jumlah anggota organisasi tersebut dengan syarat organisasi besar jangan mendominasi kekuasaan dalam federasi dan organisasi besar jangan disamakan dengan organisasi kecil yang jumlah anggotanya sedikit.[33] Dalam kenyataan, dualisme keanggotaan ini dirasakan tidak adil karena suara orang yang mewakili NU sebagai organisasi yang beranggota besar (ratusan ribu) dipandang sama dengan suara anggota Masyumi secara perorangan dalam menentukan persoalan yang penting dan prinsip.[34] Mengenai hal ini sebenarnya sudah berulang kali dipersoalkan oleh NU sejak tahun 1950 dan diusulkan agar Masyumi diubah menjadi badan federasi, tetapi tidak mendapat tanggapan yang semestinya.

Di lain pihak, di dalam dewan eksekutif yang didominasi kaum modernis terdapat dua atau tiga kelompok yang mempunyai orientasi ideologi politik yang berbeda-beda. Menurut Abu Hanifah, ketua Masyumi pertama adalah Dr. Soekiman dari SI, sedangkan

---

[32] Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik*, hlm.32.

[33] M. Ali Haidar, *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1986), hlm. 141.

[34] *Ibid*., hlm. 142.

kelompok pemikirnya dari kalangan sosialis religius seperti Syafrudin Prawiranegara, Mohamad Roem, Kasman, Jusuf Wibisono dan Abu Hanifah sendiri. Kelompok ini agak berbeda dengan kelompok muda yang dipimpin M. Natsir. Pada perkembangan selanjutnya terdapat tiga kelompok dalam Masyumi: kelompok konservatif (umumnya dari pemimpin agama muslim), kelompok moderat yang terdiri atas Mohamad Natsir, Syafrudin, Roem, dan kelompok sosialis religius yang berfikir secara Barat seperti Sukiman, Jusuf Wibisono, dan Abu Hanifah. Kelompok moderat secara politik lebih dekat kepada Syahrir, sedangkan konservatif dan sosialis religius lebih sering berdampingan.[35] Kegagalan mengarahkan dan menangani perbedaan-perbedaan ini selanjutnya menghadapkan Masyumi kepada persoalan yang lebih serius. Para pemimpin umat yang sering menyerukan persatuan, ternyata belum bisa diterjemahkan dalam kenyataan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perpecahan di Masyumi, yang merupakan cerminan dari perpecahan dari para pemimpinnya. Di Masyumi ini para pemimpinnya kurang mampu bersikap toleran dan mengendalikan diri, sehingga sulit mempertahankan persatuan yang pernah dicita-citakan.

Ketika itu semangat untuk menjadi anggota Masyumi sangat bergema, tetapi kondisi ini harus berakhir dengan semua anggota istimewa putus hubungan dengan partai ini. Pecahnya hubungan antara Soekarno dengan Masyumi yang diawali dengan ketidakpercayaan Soekarno terhadap Masyumi dan ketidakpercayaan Masyumi terhadap Soekarno meningkat. Dalam kaca mata Soekarno terlihat Masyumi bersimpati terhadap pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonsia (PRRI), sebaliknya Soekarno dilihat Masyumi sebagai penguasa yang ingin menegakkan kediktatoran dan memberi kesempatan kepada Partai Komunis Indonesia. Pada 8 September 1959 setelah pimpinan partai bermusyawarah dengan anggota istimewa bersepakat untuk melepaskan ikatan antara anggota

[35] Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik* , hlm. 113.

istimewa dengan Masyumi. Langkah ini diambil agar kegiatan organisasi yang bersangkutan tetap lancar walaupun Masyumi mendapat hambatan. Ini terbukti dengan bubarnya partai Masyumi pada tahun 1960 atas perintah Soekarno.

E. Penutup

Perjalanan Partai Masyumi sejak didirikan pada tanggal 7 November 1945 sampai dibubarkan tanggal 17 Agustus 1960 penuh dengan dinamika, baik di dalam tubuh Masyumi sendiri maupun dalam hubungannya dengan partai politik lain maupun dengan pemerintah. Masyumi mempunyai peran yang sangat bagi perjalanan perpolitikan di Indonesia, sejak awal berdirinya ia selalu terlibat dalam pemerintahan. Ada kalanya ia berkoalisi dengan partai lain dalam pembentukan kabinet, tetapi pernah juga menjadi partai oiposisi. Bagi Masyumi, keterlibatan dalam pemerintahan merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan.

Penyebaran Masyumi kepada masyarakat sangat pesat, hampir seluruh wilayah Indonesia terdapat cabang Masyumi atau organisasi Islam yang bergabung ke dalam Masyumi. Menurut catatan Kementerian Penerangan, sampai 31 Desember 1950 tercatat 237 cabang, 1080 anak cabang, 4982 ranting dan 10.000.000 anggota.

Mudahnya persyaratan untuk masuk menjadi anggota Masyumi bagi organisasi Islam menjadi penyebab banyaknya organisasi Islam yang masuk menjadi anggota. Besarnya dukungan ulama terhadap Masyumi, dan rasa persaudaraan yang besar pada masa revolusi juga menjadi penyebab pesatnya perkembangan Masyumi.

Sayang sungguh sayang kebesaran Masyumi tidak bisa bertahan, cita-citanya sebagai satu-satunya partai politik Islam tidak tercapai karena terlampau sulit menyatukan berbagai aliran keagamaan umat Islam di Indonesia dalam satu tujuan politik. Selain itu hegemoni pemerintahan yang otoriter terhadap partai politik yang

ada termasuk di dalamnya partai Masyumi adalah bentuk kegagalan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Azis, Abdul, *Politik Islam, Islam Politik: Pergulatan Ideologi PPP menjadi Partai Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Berkhofer, Robert, Jr, *A Behavioral Approach to Historical Analysis*. New York: Collier Macwillan Limitid London The Free Press, 1971.

Haidar, M. Ali, *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Kementerian Penerangan, *Kepartaian dan Parlementarian Indonesia.* Jakarta*:* t.p.*,*1945.

Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dengan Partai Jami'at Islam (Pakistan)*.Jakarta: Paramadina, 1999.

Martahan Sitompul, Einar, *NU & Pancasila*. Yogyakarta: Lkis, 2010.

Ma'arif, A.Syafi'i, *Islam dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: PT Pustaka Parama Abiwara, 1992.

Natsir, Muhammad, *Islam sebagai Ideologi Masyumi*. Jakarta: Aida, 1950.

Nasution, Harun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*.Jakarta: Djambatan. 1992.

Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional1945-1965*. Jakarta: Pustaka Utama Grafitti, 1988.

Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis, Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal.*Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.

Tsaqafiyyat. Volume 12, no. 1 Januari-Juni 2011.

Wirjosukarto, Amir Hamzah, *Wawasan Politik Seorang Patriot: Soekiman Wirjosendjoyo 1898-1974*. Malang: YP2LPM, 1984.